

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi yang berlangsung seperti saat ini di Indonesia, mayoritas masyarakat menuntut pemerintahan agar mampu memberikan dan menyajikan informasi secara akurat kepada publik dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak publik. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat tersebut, maka seharusnya akan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggungjawab (*accountability*) dalam setiap tindakan yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan kinerja pemerintahan. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan oleh setiap pemerintahan untuk mencegah adanya kesenjangan dan kesalahpahaman yang terjadi antara pemerintahan dengan masyarakat.

Suatu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang digunakan sebagai pendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi-informasi yang akan dijadikan sebagai bahan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, untuk membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta untuk membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.¹

¹ Freddy Samuel Kawattu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2019), 7.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.² Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik pada suatu pemerintahan dapat ditandai dengan adanya penyajian laporan keuangan secara baik dan utuh serta mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disajikan secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan agar publik dapat mengetahui informasi tersebut. Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun sebaliknya jika penyajian laporan keuangan tidak lengkap dan tidak mudah untuk diakses, maka hal tersebut akan menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri telah memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015

² Ajeng Ayu Sabriani dan Sri Rahayu. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019)". Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, Vol. 5, No. 2,(2020), 3.

sampai dengan tahun 2021 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 www.beritajatim.com. Hal tersebut dilakukan oleh BPK-RI yang melihat berdasarkan transaksi laporan keuangan, sehingga dengan opini WTP tersebut BPK-RI perlu lebih jauh meneliti tingkat akuntabilitasnya. Berkaitan dengan akuntabilitasnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan prosedur administrasi sangat baik dengan penuh kehati-hatian sehingga laporan keuangan dinilai sangat bagus oleh BPK-RI. Meskipun mendapatkan opini WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, masih ada 5 temuan signifikan untuk Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu pengelolaan dan penatausahaan asset tetap belum memadai, penatausahaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum memadai, kebijakan akuntansi pemerintah belum sepenuhnya memadai, terdapat penatausahaan persediaan atas bantuan COVID 19 yang masih belum memadai, dan terdapat kemahalan harga pengadaan barang penanganan COVID 19 dari belanja tak terduga yang harus segera diperbaiki agar meningkatkan keakuntabelan pengelolaan keuangan daerah Pamekasan. Menurut ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman mengatakan, opini WTP bukanlah jaminan bahwa terbebas dari penyelewengan penyelenggaraan keuangan daerah dimana masih ada beberapa koreksi dari BPK yang harus segera diminimalisir agar terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.³

Selain itu, Masyarakat Pamekasan juga dapat mengakses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan selama 4 tahun terakhir di

³ Dilansir dalam www.rri.co.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

laman <https://keuanganppamekasankab.com>. Hal tersebut sedikit banyak telah memenuhi prinsip akuntabilitas, akan tetapi, Pemerintah Daerah Pamekasan hanya mempublikasikan LKPD pada 4 tahun terakhir saja dan pengaksesannya juga tergolong sedikit sulit bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak hanya disebabkan karena laporan keuangan tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan keuangan tersebut tidak dapat atau tidak mudah secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna.

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Zeny Antka, dkk⁴, Firstcilia eldy Putri dan Hafzan Fikrian yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil penelitian terdahulu sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Namun, pada penelitian ini peneliti menggabungkan kedua variabel yakni penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Sehingga terbentuklah sebuah judul penelitian yang akan diteliti yakni “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

⁴ Zeny Antika, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol. 16, No. 2 2020, 212.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh secara simultan antara penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah ada pengaruh secara langsung penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah ada pengaruh secara langsung aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara langsung penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara langsung aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama terkait pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang ilmu akuntansi khususnya tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menjadi referensi tambahan pada perpustakaan.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan tambahan atau solusi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi serta juga menjadi solusi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan baru yang akan dibuat.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah suatu hal yang diyakini atau dianggap benar. Sejumlah asumsi-asumsi dapat berbeda antara satu dengan yang lain, karena apa yang dianggap benar oleh yang satu, dapat dianggap tidak benar atau diragukan kebenarannya oleh yang lain. Oleh sebab itu, asumsi-asumsi tersebut perlu dirumuskan.⁵

Variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu: Penyajian Laporan keuangan⁶, Aksesibilitas Laporan Keuangan⁷, Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan⁸, Kualitas Laporan Keuangan⁹, Transparansi¹⁰, Kompetensi¹¹, Pengendalian Internal¹², dan Sistem Akuntansi keuangan¹³. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Penyajian laporan Keuangan dan Aksesibilitas laporan Keuangan. Sedangkan variabel lainnya dianggap nilainya konstan (*Ceteris Paribus*).

⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 93-94.

⁶ Mawaddah, Murhaban dan Dewi Keumala Sari, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal pemerintah Terhadap Akuntabilitas", *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2019)

⁷ Mawaddah, Murhaban dan Dewi Keumala Sari.

⁸ Friscilia Eldy Putri, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jom FEKON*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2017)

⁹ Hafzan Fikrian, "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)", *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2017)

¹⁰ Ria Herlina, Taufeni Taufik dan Azwir Nasir, "Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi", *Journal of Economic, Business, and Accounting*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2021)

¹¹ Ria Herlina, Taufeni Taufik dan Azwir Nasir.

¹² Zeny Antika, Yunika Murdayanti dan Hafifah Nasution, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol. 15, No. 2, (2020)

¹³ Zeny Antika, Yunika Murdayanti dan Hafifah Nasution.

Pada laporan keuangan Kabupaten Pamekasan masih ditemukan beberapa temuan signifikan oleh BPK-RI yang harus segera diperbaiki. Selain itu masalah pengaksesan laporan keuangan daerah yang belum dipublikasikan secara maksimal. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketika sebuah Pemerintah Daerah menjalankan keduanya dengan baik dan maksimal, maka akan terbentuk sebuah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan.

F. Hipotesis Penelitian

Menurut Nurastuti dalam Turkiran, hipotesis terdiri dari dua kata yaitu dari kata “*hypo*” yang berarti sebelum dan “*thesis*” yang berarti dalil. Jadi hipotesis berarti dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sebenarnya, karena perlu pembuktian terhadap kebenarannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ali yang menyatakan bahwa hipotesis diartikan sebagai rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan penelitian¹⁴. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Ada pengaruh secara simultan antara penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.

¹⁴ Turkiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 24

H2: Ada pengaruh positif dan signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.

H3: Ada pengaruh positif dan signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.

G. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang meliputi variabel dan objek penelitian.

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (*Independent variable*) adalah variabel yang diduga sebagai munculnya variabel-variabel terikat. Sedangkan variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel respon berarti variabel terikat akan muncul sebagai akibat dari manipulasi dari suatu variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian atau yang bisa disebut dengan variabel bebas¹⁶.

Dalam penelitian ini penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel independen (bebas) dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen (terikat).

2. Objek penelitian

¹⁵ M.E. Winarno. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Malang: UM PRESS, 2011), 26.

¹⁶*Ibid*, 28.

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

H. Definisi Istilah

Dalam sebuah penelitian definisi istilah atau definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Menurut UM Definisi istilah dapat berbentuk definisi operasional variabel yang akan diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional tersebut akan menunjuk pada alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.¹⁷

Definisi istilah dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021” adalah:

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan struktur yang dibuat untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas serta dijadikan sebagai pedoman bagi para penggunanya dalam membuat keputusan ekonomis.¹⁸ Tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu antara lain:

- a. Menginformasikan jumlah dan jenis harta
- b. Menginformasikan jumlah dan jenis kewajiban serta modal.

¹⁷*Ibid*, 34.

¹⁸ Aldila Septiana, Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan, (Pamekasan: DUTA MEDIA PUBLISHING, 2019), 2-3

- c. Menginformasikan jumlah dan jenis pendapatan.
- d. Menginformasikan jumlah dan jenis pengeluaran.
- e. Menginformasikan perubahan.
- f. Merefleksikan kinerja manajemen.
- g. Menginformasikan catatan laporan keuangan.¹⁹

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah suatu keadaan dimana terdapat kemudahan bagi seseorang dalam memperoleh dan mengakses informasi laporan keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik itu melalui internet, surat kabar atau media lain. Aksesibilitas dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam penguatan partisipasi publik.²⁰

3. Akuntabilitas

Kata akuntabilitas merupakan kosa kata baru yang berasal dari bahasa inggris "*accountability*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban. Dalam KBBI pertanggungjawaban mempunyai arti perbuatan (hal) bertanggungjawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (*accountability*), artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai petanggungjawaban.²¹

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau

¹⁹*Ibid*, 4-7.

²⁰ Salomi J. Hehanussa, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon, Conference in Business, Accounting, and Management, Vol. 2, No. 1 Mei 2015, 82.

²¹ Sjamsiar Sj. Indradi, Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, (Malang: UMM Press, 2020), 1.

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.²²

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun pada penelitian ini peneliti juga ingin menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Melalui hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar atau acuan yang perlu dilakukan yang berupa temuan-temuan yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan masalah pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

²² Hamirul dan Alamsyahril, *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), 18.

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Yusriwati	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri	Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

		Hilir.	keuangan daerah
3	Zeny Antika, Yunika Murdayanti dan Hafifah Nasution	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4	Welly Surjono dan Nova Rusliana Firdaus	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Bandung	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah

5	Ria Herlina, Taufeni Taufik dan Azwir Nasir	Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi	Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
---	---	---	---